

BAB I

A. Latar Belakang

Skripsi ini bertujuan membahas tentang bagaimana peran yang diambil Amnesty International dalam menangani krisis kemanusiaan di kawasan Timur Tengah dengan fokus negara Yaman dan Suriah sebagai studi kasus untuk menganalisa bentuk advokasi yang diterapkan oleh Amnesty International dalam menghadapi isu – isu kemanusiaan di Timur Tengah pasca fenomena Arab Spring.

Nilai – nilai kemanusiaan adalah nilai yang dibentuk atas dasar norma sosial yang secara eksplisit menjelaskan bagaimana setiap manusia memiliki kesamaan untuk diperlakukan secara manusiawi dan terlepas dari kekangan serta paksaan manusia lainnya. Saat ini terdapat banyak pakta dan perjanjian internasional yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, isu – isu mengenai hak asasi manusia saat ini banyak dijadikan sebagai alat perundingan dan kerjasama bilateral maupun multilateral oleh beberapa negara.

Namun jelas bahwa tidak sedikit negara – negara yang gagal untuk mengimplementasikan secara praktis setiap prinsip hak asasi manusia yang secara terbuka mereka terus promosikan. Bisa dilihat contohnya dari beberapa negara yang meratifikasi sedemikian rupa perjanjian terkait hak asasi manusia, akan tetapi masih banyak kasus seperti diskriminasi ras, gender, agama dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat mereka sendiri.

Dari sini kita dapat mengetahui secara jelas bahwa kurangnya pemahaman secara luas oleh setiap individu terhadap setiap norma yang terkandung dalam prinsip hak asasi manusia, terlepas dari seberapa banyak perjanjian serta institusi – institusi formal yang bertanggungjawab untuk menegakkan hak asasi manusia. Sebab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang norma yang terbentuk di dalam prinsip membutuhkan pemahaman secara empiris dan teoritis terlebih dahulu bagi individu ataupun organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Amnesty International merupakan salah satu NGO yang menjadi aktor kunci dalam pembentukan standar norma internasional terkait prinsip – prinsip hak asasi manusia. Bahkan kinerjanya bisa dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan suatu negara. Dapat dilihat dari bagaimana mereka melakukan identifikasi dan pengawasan kasus pelanggaran terhadap kemanusiaan, sehingga Amnesty International sangat dibutuhkan untuk menjamin pengawasan terhadap norma – norma internasional tetap berjalan (Clark, 2001).

Secara teoritis, advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International sangatlah penting bagi studi hubungan internasional karena menciptakan tantangan untuk pandangan realisme, salah satu teori terkemuka dari hubungan internasional yang melihat negara sebagai aktor dominan dalam politik internasional dan kekuasaan sebagai penentu utama dalam pembuatan kebijakan. Kenneth Waltz, pendukung utama teori realis, bahkan memprediksi bahwa aktor selain negara harus memiliki kekuatan dari atribut negara untuk menjadi sukses (Waltz, 1979). Faktor efektifitas Amnesty International jelas

sangat berbeda dari negara, namun seperti yang ditunjukkan oleh banyak studi kasus, mereka memiliki dampak yang signifikan pada tindakan negara dalam pembuatan kebijakan (Clark, 2001).

Berdasarkan dari survey Amnesty International, kawasan Timur Tengah merupakan tempat dengan pelanggaran hak asasi manusia yang cukup banyak. Dilihat dari berapa banyaknya kasus – kasus seperti konflik bersenjata, kemiskinan dan kelaparan. Semenjak dimulainya fenomena *Arab Spring* di kawasan timur tengah pada tahun 2010, banyak penduduk yang hidup di bawah pemerintahan otoriter. Siapa pun yang mencoba bersuara melawan pemerintah, mulai dari partai oposisi, *public figure*, jurnalis dan aktivis HAM, telah ditangkap dan dipenjarakan. Di beberapa negara seperti Suriah, Yaman dan Libya, perang yang berkecamuk telah memakan cukup banyak korban jiwa, sehingga warga sipil terpaksa memilih meninggalkan tanah airnya, atau hidup dalam tekanan rasa takut. Selain itu terdapat berbagai macam tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kedua negara tersebut terhadap warga negara sendiri,

sehingga mereka yang tetap tinggal di negaranya tidak diberikan asas keadilan oleh rezim yang berkuasa (Amnesty International, 2019)

Rumusan Masalah

Bagaimana upaya advokasi Amnesty International dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman?

B. Kerangka Teori

Teori NGO

Adapun analisa yang digunakan untuk membantu saya dalam tulisan yang nantinya akan saya susun yaitu dengan menggunakan Teori NGO dan Model Segitiga Advokasi (Azizah, 2013).

NGO merupakan lembaga yang bersifat independen tanpa ada ikatan dengan kepentingan suatu negara dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial dengan melakukan advokasi terhadap isu – isu yang ingin diselesaikannya. Dalam masyarakat internasional terdapat rezim yang memiliki peran dalam menghadapi isu – isu global. Menurut para ilmuwan, pembentukan

rezim internasional merepresentasikan suatu reaksi terhadap peningkatan kompleksitas, ditambah dengan adanya perubahan masalah global yang mana dapat mengancam kapasitas masyarakat internasional dalam merespon kondisi ekonomi, sosial dan politik yang baru. (Evans & Wilson, 1992)

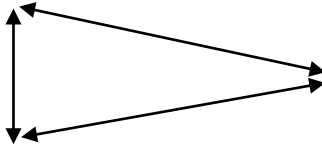
Dalam hal ini, peran NGO sebagai bagian dari rezim internasional sangatlah krusial, Sebab NGO merupakan suatu organisasi *independent* yang bergerak tanpa terikat dengan kepentingan suatu negara dalam mencapai tujuan sosial politik, seperti kemanusiaan, lingkungan, dan lain sebagainya. Meskipun pada akhirnya negara dan institusi Internasional merupakan aktor utama dalam politik internasional, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa advokasi NGO mampu mendorong perubahan sikap suatu negara secara normatif. Kemudian kita juga harus mengakui bahwa di era globalisasi ini, negara tidak dapat bergerak menurut kemauannya sendiri, sebab dengan adanya kemajuan dalam teknologi informasi, masyarakat dan NGO juga mengambil peran yang esensial dalam melakukan *check and balances* terhadap pengambilan keputusan.

Sehingga kerjasama antara mereka sangat dibutuhkan (Humpreys, 1996).

Segitiga Advokasi

Kerja Pendukung

(Supporting Units)



Kerja Basis

(Ground – Underground Works)

Kerja Garis Depan

(Front Lines)

Advokasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu pihak yang bertujuan untuk merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kepentingan – kepentingan pihak tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu advokasi akan berhasil jika terdapat perubahan yang dikehendaki dalam suatu kebijakan publik. Kegiatan advokasi sebagai sarana penggalangan opini publik memiliki suatu tujuan yang tidak hanya menjadikan orang lain tahu tentang suatu isu yang sedang

terjadi di antara masyarakat sosial, namun juga berupaya membangun rasa empati di dalam diri mereka sehingga ada dorongan untuk terlibat dalam menangani isu yang terjadi (Azizah, 2013).

Model Segitiga Advokasi menggambarkan aktor – aktor yang berpartisipasi dalam proses advokasi dengan cara membangun koordinasi antar anggotanya agar dapat melakukan segala proses kegiatan secara lancar. Ketiga peran di atas memiliki fungsinya masing – masing ketika melakukan kegiatan advokasi. Kerja basis, merupakan pihak yang berfungsi sebagai pembangun massa serta melakukan mobilisasi aksi di lapangan. Kerja pendukung, merupakan pihak yang berfungsi sebagai penyedia dukungan untuk para aktivis dengan menyediakan dana, logistik serta data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Kerja garis depan, merupakan pihak yang bertindak sebagai penggagas / pemraksara advokasi yang bertugas dalam aktivitas *lobbying* dan proses legalisasi aksi.

Model Segitiga Advokasi juga sangat relevan jika digunakan untuk meneliti kinerja Amnesty International, mengingat mereka sebagai NGO yang kegiatan utamanya adalah melakukan pengawasan

terhadap jalannya sistem yang mendukung nilai – nilai Hak Asasi Manusia dan menentang segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan melakukan kampanye untuk menarik simpati dari masyarakat internasional terhadap korban – korban yang mengalami penindasan (What we do: Amnesty International). Serta secara aktif melakukan advokasi untuk memperoleh dukungan dari institusi nasional maupun internasional.

Adanya pembagian peran bagi para aktor dalam sebuah kegiatan advokasi seperti yang telah digambarkan dalam model diatas juga diperlukan bagi setiap NGO atau organisasi lainnya. Karena dalam menjalankan aktivitas sebuah organisasi perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukannya tetap mematuhi tata tertib masyarakat di suatu wilayah. Sehingga pada akhirnya semua orang mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut bersifat legal karena sesuai dengan prosedur hukum. Hal ini juga yang membedakan mereka dengan kelompok – kelompok anarkis yang ada di masyarakat sosial.

Dengan mengaplikasikan model Segitiga Advokasi kita dapat lebih mudah untuk menganalisa seberapa efektif peran yang diambil oleh Amnesty International dalam menangani krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman. Penerapan dari model tersebut dapat dianalisa melalui setiap kegiatan yang dilakukan oleh aktor – aktor yang terlibat, baik yang merupakan aktor internal seperti para aktivis Amnesty International itu sendiri maupun. Mulai dari tahap pengumpulan data di lapangan hingga sampai pada tahap advokasi kepada institusi nasional maupun internasional. Proses analisa ini sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas Amnesty International sebagai salah satu NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan.

Kemudian, dengan dipilihnya kedua negara, yaitu Yaman dan Suriah sebagai sampel dari penelitian ini, kita akan lebih dapat memahami sejauh mana model ini dapat dikatakan efektif untuk diterapkan di lapangan dengan melakukan perbandingan berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh Amnesty International.

C. Hipotesa

Dalam menghadapi krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah dan Yaman, Amnesty International memiliki strategi advokasi untuk membangun jaringan massa yang bertujuan untuk membantu korban – korban dari krisis kemanusiaan yang terjadi di Yaman dan Suriah dengan melakukan lobbying terhadap aktor – aktor lainnya untuk ikut terlibat dalam menghadapi isu yang berkaitan. Kedua, meningkatkan kepedulian masyarakat internasional terhadap kondisi Yaman dan Suriah saat ini dengan memanfaatkan *media exposure* sebagai alat kampanye. Ketiga, melakukan monitoring terhadap perkembangan yang terjadi di Yaman dan Suriah dengan memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kinerja Amnesty International di kedua negara tersebut.

D. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini saya sebagai penulis menggunakan metode kualitatif. Untuk mengkaji penelitian ini, saya melakukan teknik pengumpulan data menggunakan sumber pustaka (library

research) yang berasal dari jurnal ilmiah, buku – buku, media informasi seperti internet, berita dan artikel serta sumber lainnya yang sekiranya relevan dapat membantu menyediakan dukungan untuk meningkatkan kualitas penulisan mengenai isu yang saya angkat. Sedangkan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder, mengingat data yang diambil mayoritas berasal dari sumber – sumber tertulis. Lalu di akhir penulisan ini, saya sebagai penulis akan menyajikan data secara deskriptif.

E. Jangkauan Penelitian

Saya akan membatasi penulisan ini agar tidak keluar terlalu jauh dari pembahasan utama. Fokus yang akan diambil dalam penulisan kali ini ialah mengamati bagaimana kinerja Amnesty Internasional sebagai NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan. Dengan melihat sejauh mana hasil yang ditimbulkan berdasarkan aktivitas Amnesty International di Yaman dan Suriah dalam beberapa tahun terakhir ini.

F. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II akan membahas tentang program yang dimiliki Amnesty International serta bagaimana upaya advokasi yang dilakukan oleh Amnesty International dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Yaman dan Suriah .

BAB III terdiri dari kesimpulan dan penutup.